



LAPORAN KEUANGAN

**BIRO UMUM DAN ASD SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA**

PER 31 DESEMBER 2025 AUDITED

Disusun Oleh :

SUBBAG PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Biro sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2026
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,



SYONY TJAHJADI
NIP. 197204021963021001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xi
LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
LAPORAN OPERASIONAL	xiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xv
NERACA	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematisasi Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	7
2.1.2 Laporan Operasional (LO)	8
2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	8
2.1.4 Neraca	8
2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	8



2.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
2.2.1	Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
2.2.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/ Hambatan Kinerja tidak tercapai Biro Umum dan ASD Setda Prov. DKI Jakarta Tahun 2025	11
BAB III	KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI	13
3.1	Entitas Pelaporan Keuangan	15
3.2	Dasar Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
3.3	Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	16
3.3.1	Pendapatan - LRA	16
3.3.2	Pendapatan - LO	17
3.3.3	Belanja	19
3.3.4	Beban	26
3.3.5	Aset	27
3.3.5.1	Aset Lancar	28
3.3.5.2	Aset Tetap	31
3.3.5.3	Aset Lainnya	35
3.3.5.4	Pengakuan penghentian/penghapusan Aset	36
3.3.6	Kewajiban	36
3.1.1	Ekuitas	38
3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	38
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	39
4.1	Laporan Realisasi Anggaran	39
4.1.1	Pendapatan	40
4.1.2	Belanja	40



4.1.2.1	Belanja Pegawai	41
4.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42
4.1.2.3	Belanja Hibah	42
4.1.2.4	Belanja Modal	42
4.2	Neraca	44
4.2.1	Aset	45
4.2.1.1	Aset Lancar	46
4.2.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	47
4.2.1.1.2	Piutang	47
4.2.1.1.3	Penyisihan Piutang	47
4.2.1.1.4	Belanja di Bayar di Muka	47
4.2.1.1.5	Persediaan	48
4.2.1.2	Aset Tetap	48
4.2.1.2.1	Tanah	50
4.2.1.2.2	Peralatan dan Mesin	50
4.2.1.2.3	Gedung dan Bangunan	61
4.2.1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	51
4.2.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	51
4.2.1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	51
4.2.1.2.7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	52
4.2.1.2.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	53
4.2.1.2.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	53
4.2.1.2.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	54
4.2.1.3	Aset Lainnya	54
4.2.1.3.1	Aset Tidak Berwujud	55
4.2.1.3.2	Aset Rusak Berat	56

4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan	
Status Aset	56
4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi	57
4.2.2 Kewajiban	57
4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	58
4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD	59
4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai	59
4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa	62
4.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	65
4.2.2.1.5 Utang Lainnya	68
4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	68
4.2.3 Ekuitas	68
4.3 Laporan Operasional	68
4.3.1 Pendapatan Operasional	69
4.3.2 Beban Operasional	69
4.3.2.1 Beban Pegawai	70
4.3.2.2 Beban Barang	70
4.3.2.3 Beban Jasa	71
4.3.2.4 Beban Pemeliharaan	72
4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas	73
4.3.2.6 Beban Hibah	73
4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	73
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	73
4.4.1 Ekuitas Awal	74
4.4.2 Surplus/(Defisit) LO	74
4.4.3 Mutasi RK PPKD	74
4.4.4 Koreksi Ekuitas	75

4.4.5	Ekuitas Akhir	75
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	76
5.1	Struktur Organisasi	76
5.2	Tugas Pokok	76
5.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	80
5.4	Penghargaan	81
BAB VI	PENUTUP	83
6.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	83
6.2	Laporan Operasional (LO)	84
6.3	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	84
6.4	Neraca	84
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.2	Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..	11
Tabel 4.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024	39
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	41
Tabel 4.3	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	42
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025	43
Tabel 4.5	Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2025	44
Tabel 4.6	Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2025 dan 2024	45
Tabel 4.7	Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024	46
Tabel 4.8	Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 4.9	Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	54
Tabel 4.10	Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024	58
Tabel 4.11	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ..	58
Tabel 4.12	Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025	59
Tabel 4.13	Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	63
Tabel 4.14	Perbandingan Beban TALI Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel 4.15	Perbandingan Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel 4.16	Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO	70
Tabel 4.17	Perbandingan Beban Barang LRA dan LO	71
Tabel 4.18	Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO	72
Tabel 4.19	Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO	72



Tabel 4.20	Perbandingan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024	74
------------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	78
Gambar 5.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	79
Gambar 5.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	80



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Persediaan
2. Daftar Aset
3. Matriks Per 31 Desember 2025 Audited
4. Rekap Bahan
5. Rekap Mutasi Aset
6. DRMA
7. Berita Acara Rekonsiliasi Belanja dan Aset
8. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 (*Audited*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan saya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta, 2026
**KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,**



**SYONY TJAHJADI
NIP 197204021983021001**





**LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM DAN
ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

PER 31 DESEMBER TAHUN 2025
Audited

**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025**





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025**
Audited

**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025**





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BIBIT UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	KETERANGAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	4,00	0,00
Rendemen Domestik		0,00	0,00	4,00	0,00
Hasil Pengalihan, Ekspansi Daerah yang Digratisir		0,00	0,00	4,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	4,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Tanpa Syarat / Tanpa DIPA		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Operasi Khusus dan Dana Tambahan Insentif		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bantu		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantu (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bantuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sah yang Eksternal Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		1.014.144.127,00	899.942.928,00	79,30	673.449.045,00
Belanja Monev dan Jaj		137.979.320,00	121.435.368,00	87,99	128.719.771,00
Belanja Bahan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Istimewa		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Istimewa		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Monev dan Jaj		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Monev dan Jaj		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Monev dan Jaj		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah BELANJA OPERASI		1.152.123.447,00	1.021.378.296,00	88,29	802.168.816,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Lembar Bagan)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2015	REALISASI Tahun 2015	(%)	REALISASI Tahun 2014
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengalokasian Ketersediaan Daerah yang Didistribusikan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Khusus (dik. Dept. Trans) dan Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Ketersediaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Baku		0,00	0,00	0,00	0,00
Istimewa Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial Umum (BSU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Transfer ke Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Monev		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Peraturan Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		749.210.444.337,00	465.043.979.000,00	62,07	672.447.803.548,00
Belanja Barang dan Jasa		131.499.220.794,00	127.036.396.483,00	96,62	1.09.719.778.888,00
Belanja Bangun		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial ke PMN dan Organisasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		880.709.665.131,00	592.080.375.483,00	67,22	682.167.582.436,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perbaikan dan Merenovasi		13.120.664.788,00	12.795.740.788,00	97,52	34.339.833.422,00
Belanja Modal Operasi dan Bangunan		12.097.962.673,00	5.476.347.813,00	45,35	2.334.348.022,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BIRU UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

1.000.000.000

URAIAN	DATA	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	7.840.238.400,00
Belanja Modal Asat Tumpukan		1.780.330,00	0,00	0,00	134.733.000,00
Belanja Modal Asat Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		26.214.670.700,00	11.725.037.000,00	36,48	47.973.200.400,00
BELANJA TIDAK TERSEDIA					
Belanja Tidak Tersedia		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERSEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		911.944.548.000,00	148.886.635.416,00	92,43	649.120.000.041,00
MUTUAS (SURPLUS)		(913.864.548.000,00)	(148.886.635.416,00)		(649.120.000.041,00)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN PERSEKUTUAN					
Salah satu Persekutuan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	4,00
Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengisian Kebutuhan Daerah yang Dipinjamkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pengisian Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kredit/ Pinjaman Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Uang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN PERSEKUTUAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN					
Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Pinjaman Uang yang tidak terdapat		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pengisian Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Uang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
Salah satu Persekutuan Anggaran Tahun Sebelumnya		(913.864.548.000,00)	(148.886.635.416,00)		(649.120.000.041,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2025
KEPALA BIRU UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Syony Tjahjaja
NIP 197204021983021001



**LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025**
Audited

**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025**





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
00401997 - BIRU LAMUN DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADALD)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi (PADALD)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rent Tanah dan Bangunan Daerah yang Dipakai-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PADALD yang Belum-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN BANGUNAN-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemukiman Pusat-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Aset Daerah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Donasi-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sosial yang Sama KEMKOT dan Perikanan Pemerintah (Lain-lain PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI		672.825.492.779,00	766.879.696.297,00	94.054.203.518,00	13,98
Belanja Pegawai		568.946.112.724,00	662.921.340.274,00	93.975.228.550,00	16,52
Belanja Barang dan Jasa		123.707.574.953,00	111.645.244.444,00	12.062.330.509,00	9,75
Belanja Hibah		23.126.351.343,00	27.817.170.449,00	4.690.819.106,00	20,30
Belanja Aset		84.621.180.433,00	73.458.542.784,00	11.162.637.649,00	13,19
Belanja Pemeliharaan		13.723.861.854,00	16.349.870.447,00	2.626.008.593,00	19,13
Belanja Mula		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pengadaan Barang		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan dan Pemeliharaan		48.271.433.483,00	56.777.756.133,00	8.506.322.650,00	17,62
Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mula		19.236.564.592,00	1.979.042.634,00	17.257.521.958,00	89,71
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		37.241.510.461,00	43.029.811.089,00	5.788.300.628,00	15,53
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Lahan		538.273.868,00	551.833.968,00	13.560.100,00	2,52
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		26.951.180,00	26.951.180,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya		34.770.344,00	160.107.234,00	125.336.890,00	360,28
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Properti Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
40601907 - BIRU UTAM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Lembar 1) (Lanjutan)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	PERUBAHAN (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADALC)		4,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LD		4,00	0,00	0,00	0,00
Kontribusi Usaha-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengalokasian Ekspansi Daerah yang Diperoleh-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PADALC yang Baru-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LD		4,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemecatan Pensiun-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Aspek Daerah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Uraian Hibah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sama dengan Kategori Pemecatan Pensiun yang Diperoleh-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PENDAPATAN		8,00	0,00	0,00	0,00
SELISIR					
BEBAN OPERASI		413.454.494.779,00	766.137.498.133,00	35.313.492.366,00	1,28
Beban Pegawai		499.548.113.774,00	803.201.280.274,00	46.416.852.350,00	1,11
Beban Barang dan Jasa		134.387.179.450,00	113.440.748.959,00	81.306.668.036,00	1,09
Uraian Barang		28.129.351.362,00	21.815.120.469,00	1.309.230.894,00	4,00
Beban Jasa		34.835.109.632,00	14.624.540.731,00	3.429.617.937,00	13,49
Uraian Pemeliharaan		15.723.807.054,00	14.544.076.849,00	1.039.209.199,00	71,64
Beban Bangun		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Prasarana		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		46.212.629.819,00	53.777.798.126,00	47.545.216.700,00	103,33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		14.234.764.512,00	17.979.043.604,00	1.297.328.928,00	27,17
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		32.342.518.401,00	43.009.261.089,00	41.077.409.676,00	124,85
Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Angkutan		531.833.066,00	541.620.068,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		74.957.010,00	38.585.010,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		94.778.344,00	188.107.754,00	155.221.000,00	167,18
Beban Amortisasi Aset Takberwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Geospasial		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hoge Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Kewilayatan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
40601907 - BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Lampiran Laporan)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITIR)	KENDALIAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
BEBAN					
Beban Keras yang telah terjadi dan pengalokasian		4,00	4,00	0,00	0,00
Jumlah BEBAN		876.597,374,194,00	821.914.758,518,00	48.973,175,476,00	5,56
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(171.001.426.154,00)	(181.564.750,518,00)	149.573.175,476,00	5,26
ASSET OPERASIONAL					
BUMIPUTRA NON OPERASIONAL-LA		0,00	0,00	0,00	0,00
Saluran Penyediaan Pemukiman Perkotaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Saluran Penyediaan Kowasir dan Angin		0,00	0,00	0,00	0,00
Saluran Air Keras dan Sistem Drainase Perkotaan		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LA		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Pengadaan Kebutuhan dan lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR DAERAH					
DAKAS TAK TERDISTRIBUSIKAN		0,00	0,00	0,00	0,00
Eksternal Yaitu Yandaga		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah POS LUAR DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - DA		(171.001,426,154,00)	(181,914,758,518,00)	149,573,175,476,00	5,26

(Myl) Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Syarif Tjahjedi
NIP 197204021993021001



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025**
Audited

**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025**





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 (lap 2023)		209.737.871.483,00	(176.205.591.800,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		647.672.922.614,00	1.114.608.750.567,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		857.410.794.097,00	938.403.152.767,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		638.374.645.067,00	1.114.630.874.167,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(647.672.922.614,00)	(1.114.608.750.567,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		(9.298.277.547,00)	23.121.600,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		848.112.516.550,00	938.425.282.367,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(870.387.926.194,00)	(821.914.750.518,00)
Mutasi RK PPKD		946.449.759.904,00	638.352.323.467,00
Koreksi Ekuitas		76.594.151.080,00	93.249.462.234,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		152.155.983.790,00	(98.312.708.817,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		63.117.018.913,00	209.737.871.481,00
RK PPKD		937.151.051.357,00	638.374.645.067,00
EKUITAS AKHIR		1.000.268.100.350,00	848.112.516.550,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Syany Tjahjadi
NIP 197204021993021001



NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025
Audited

BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRU UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 HANG 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASSET LAIN-LAIN			
Kas dan Setoran Misi		0,00	0,00
Kas di Bendahara Perantara		0,00	0,00
Pembayaran yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas Pemerintah yang Ditahan Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas di Bendahara Perantara		0,00	0,00
Sisa LP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Utang Pagar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Utang Pagar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
Potongan PPK di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
PPK 11 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK 12 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK 25 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK 16 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK Pasal 4 ayat (2) d. SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH-BM di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
BPIS Kementerian di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
BPIS Kementerian di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK lainnya di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK 15 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Ditahan Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Hutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Hutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Hutang Hasil Penghasilan Melainkan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Hutang Jalin-Jalin PAD yang Sisa		0,00	119.240.260,00
Hutang Pembiayaan dan Transferan Grati Kegiatan Keuangan Daerah		0,00	0,00
Hutang Tambahan Biaya Kegiatan Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Hutang Tambahan Biaya Kegiatan Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Penerima atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Hutang Pembiayaan dari Penghasilan		0,00	119.240.260,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KEMENTERIAN URUSAN DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

Dikawatir: Rp

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (A.UTRUM)
Matang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Matang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Matang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Pajak dan Angsuran		0,00	0,00
Utang Muka		0,00	0,00
Utang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Utang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Utang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Pajak, Pengembalian Kelembaan Penghasilan, tagihan Pajak Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UTMK, Pengembalian Transaksi		0,00	0,00
Matang Kelembaan Pengembalian Sahabat		0,00	0,00
Matang Jaminan Koperasi Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pembayaran Matang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimensi		467.418.681,00	370.706.476,00
Beban Personal Dibayar Dimensi		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimensi		445.256.166,00	300.546.476,00
Beban Jasa Dibayar Dimensi		22.159.979,00	110.700.000,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimensi		0,00	0,00
Beban Perbaikan Dimensi Dibayar Dimensi		0,00	0,00
Persediaan		135.670.553,00	145.510.570,00
Barang Dalam Proses		135.670.553,00	145.510.570,00
Barang Tak Berwujud		0,00	0,00
Barang Belum Dipakai		0,00	0,00
Asal Laba Dibayar Dimensi		0,00	0,00
JUMLAH ASSET LANCAR		603.089.234,00	516.216.046,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Perseoran			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Perseoran		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Perseoran			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Perseoran		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TOTAL			
Tasak		468.212.780.000,00	468.512.781.000,00
Perbaikan dan Modal		122.269.813.360,00	108.767.820.374,00
Cadangan dan Beban		1.209.416.243.637,00	1.055.636.460.287,00
Jalan, Jembatan, dan Irigasi		12.318.815.697,00	12.318.815.697,00
Aset Tetap Lainnya		700.371.290,00	260.171.290,00
Ekuitas dalam Perusahaan		0,00	0,00
Aksi dalam Perusahaan		0,00	0,00
Aksi dalam Perusahaan Perbaikan dan Modal		0,00	0,00
Aksi dalam Perusahaan Cadangan dan Beban		0,00	0,00
Aksi dalam Perusahaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aksi dalam Perusahaan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Keras dan Jasa		0,00	0,00



ADDED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Lampiran B)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Konsolidasi		0,00	0,00
JUMLAH ASSET TETAP		1.015.621.251.381,00	869.495.232.338,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASSET LAINNYA			
Tagihan Jangka Pendek		0,00	0,00
Tagihan Pinjaman Anggaran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kecelakaan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Ases Kecelakaan Daerah yang Ditawarkan		0,00	0,00
Kasus Sama Pemadaman		0,00	0,00
Bantuan Ganti Kerugian Daerah (BGS/BGS)		0,00	0,00
Kasus Sama Penyelatan Infrastruktur		0,00	0,00
Ases Kecelakaan Daerah yang Dapat Ditawarkan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		40.494.136.855,00	44.186.391.222,00
Aset Rencan Berwujud		35.521.123.000,00	26.082.100.000,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Diterapkan Normanya		0,00	0,00
Aset Tetap - Floor Fund		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Restitusi Daerah yang belum diterapkan selanjutnya		0,00	0,00
Aset di BP THB Loka		0,00	0,00
Aset Lembaga & Bani Jember		0,00	0,00
Kasus Himpunan		0,00	0,00
Aset yang Belum Diterapkan Normanya		0,00	0,00
Tuntutan Penggantian UTM Program Transjakarta		0,00	0,00
Aset Restitusi Pemukiman NPA Kota Baru (Laka Bangunan/Konstruksi Daerah) (BGS/BGS)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Masalah Penghapusan Aset		16.910.212.911,00	18.020.982.399,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum diterapkan selanjutnya		0,00	0,00
Kasus yang Belum Diterapkan Normanya		0,00	0,00
Daftar Penjualan Penjualan Pungri Langgeng Himpun - Daftar Penjualan Himpun		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dengan Pihak Ketiga - Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dengan Pihak Ketiga - Konstruksi Pemeliharaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Guna Sewa/Konstruksi Sewa (BGS/BGS)		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
 Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

Catatan: Ringkas

U R U T A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Berwujud Jangka Panjang T.g. Depresiasi/Amortisasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Ketersediaan Dagang, Pihak Ketiga-Kelompokan Penyelenggara Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Karjasana Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Karjasana Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(74.542.794.929,00)	(41.799.468.527,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Berwujud Berwujud		(23.351.671.452,00)	(25.632.793.741,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fungsional		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Komersial/Finansial Mlai Kewajiban Lasa Berwujud/Kewajiban Daerah Bangunan (DLBKDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belanja Disamping Sektor		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyerahan Majelis Penetapan Serta Aset		(15.192.197.477,00)	(1.6166.264.744,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dijelaskan Untuk Usahawan Perseorangan		0,00	0,00
Data Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.598.356.826,00	2.347.334.695,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengadaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.036.174.696.655,00	872.577.938.934,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perimbangan Pihak Ketiga (Pik)		0,00	0,00
Utang Tetap		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Jangka		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Jangka Jangka		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Jangka		0,00	0,00
Utang PPh Pasal		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana RLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana RLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana RLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 25 Dana RLUD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPn 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPn Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPn Pasal 4 ayat (2) d. SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPn Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPn IS		0,00	0,00
Utang PPn IS & SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPn IS Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pasal		0,00	0,00
Utang PPN Pasal		0,00	0,00
Utang PPN d. SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Pasal BLUD		0,00	0,00
Utang Telleran		0,00	0,00
Utang Tunj. Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Pendidikan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Kredit/Pinjam Pembiayaan Kekayaan Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lainnya		0,00	0,00
Serana Kolaborasi Pembiayaan Jari. Pihak III		0,00	0,00
Utang Mula Pinjaman Pinjam Pinjam dari Pihak III		0,00	0,00
Utang Jarak Jelang Pengadaan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lainnya Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lainnya Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lainnya Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lainnya Pihak Ketiga		0,00	0,00





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U K A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Habis. Gransmisi Lainnya Modal Transmisi Pemerprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Beban Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Koperasi Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelikatan Pembayaran PAID		0,00	0,00
Utang Kelikatan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelikatan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Perhitungan Kas yang Belum Teridentifikasi - Koperasi		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Koperasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Perhitungan Kas yang Belum Teridentifikasi - Koperasi		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Pemenuhan Perjanjian Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Pemenuhan Perjanjian Dalam Negeri ... Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA ... (Proyek JUPMP/UEU)		0,00	0,00
JICA SLA ... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Pemenuhan Perjanjian Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Pemenuhan Perjanjian Luar Negeri ... Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA ... (Proyek JUPMP/UEU)		0,00	0,00
JICA SLA ... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumbah Lainnya sebagai Kontribusi Pemenuhan Pemenuhan Perjanjian		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Koperasi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00



FEB 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Platung Transfer-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Platung Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Platung Lain-lain		0,00	0,00
Bagian Lain-lain Tugasan Penjualan Asuransi		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Penghasilan Berwujud/Intan		0,00	0,00
Uang Muka Penghasilan Arang dan Jasa di SUGP		0,00	0,00
Uang Muka Penghasilan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Pemasang Pengangkutan Kelahiran Pembiayaan Asuransi Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lain-lain Tugasan Pengangkutan LMDK Penghasilan Tambahan		0,00	0,00
Pemasang Kelahiran Pembiayaan Asuransi		0,00	0,00
Pemasang Jaminan Asuransi Pihak Ketiga		0,00	0,00
Persediaan Protang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimulai		461.418.495,00	310.746.476,00
Beban Penerima Dibayar Dimulai		0,00	0,00
Beban Pemasang Dibayar Dimulai		441.218.706,00	330.546.476,00
Beban Asuransi Dibayar Dimulai		22.159.929,00	10.709.600,00
Beban Pembiayaan Tugasan Dimulai		0,00	0,00
Beban Penghasilan Lain-lain Dibayar Dimulai		0,00	0,00
Beban Lain-lain		144.470.553,00	105.519.279,00
Beban Lain-lain Lain-lain		137.670.575,00	145.519.279,00
Beban Lain-lain Lain-lain		0,00	0,00
Beban Lain-lain Lain-lain		0,00	0,00
Asuransi Lain-lain Lain-lain		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		100.000.000,00	575.966.681,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Perumahan			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Perumahan		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Perumahan			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Perumahan		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
ASSET TETAP			
Tanah		468.512.738.000,00	468.512.738.000,00
Pondasi dan Meja		122.244.431.750,00	108.767.820.321,00
Gedung dan Bangunan		1.205.416.241.437,00	1.097.436.460.287,00
Jalan, Jembatan, dan Lain-lain		17.718.875.887,00	12.318.815.697,00
Aset Tetap Lainnya		260.371.290,00	260.371.290,00
Kontrolasi Dalam Pengukuran		0,00	0,00
Amanat Penyusutan		(793.136.812.390,00)	(616.001.078.766,00)
Amanat Penyusutan Perbaikan dan Meja		(71.292.621.045,00)	(57.427.988.684,00)
Amanat Penyusutan Gedung dan Bangunan		(713.374.402.084,00)	(753.487.069.467,00)
Amanat Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Lain-lain		(7.710.281.804,00)	(7.258.447.933,00)
Amanat Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(119.566.260,00)	(152.551.250,00)
Aset Tetap Lain-lain		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

DEBIT	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akuntansi Penyusutan Aset Korporasi Tetap		0,00	0,00
Jumlah ASET TETAP		1.015.691.251.381,00	349.695.232.238,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Langka Panjang		4,00	0,00
Tagihan Penjualan Anggaran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi/Denda Daerah		4,00	0,00
Kontribusi dengan Pihak Ketiga		4,00	0,00
Aset Keuangan Daerah yang Diinvestasikan		4,00	0,00
Kerja Sama Pemukiman		0,00	0,00
Bagian Dasar Sengketa/Bagian Sengketa Dasar (BGS/BSD)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyelenggaraan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Keuangan Daerah yang Diinvestasikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		44.494.136.051,00	44.106.291.312,00
Aset Rumah Renda/Uang		24.127.323.004,00	26.085.308.823,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Beton Milik Ganti		0,00	0,00
Aset Tetap - Beton Eksistensi Struktur		0,00	0,00
Aset Tetap - Fungsional Forum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP TERP Laksana		0,00	0,00
Aset Lahan dan Rm Eksistensi		0,00	0,00
Kerjasama Pemukiman		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditentukan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Penyelenggaraan UMR Pengadaan Transmigrasi		0,00	0,00
Aset Kontribusi Pemukiman Milik Konfirmasi Laka (Bagian/Bagian Dasar Pemukiman (KLB/KDB))		0,00	0,00
Aset Dalam Rangka Penyelenggaraan Madya Pemukiman Sengketa Aset		16.910.813.955,00	14.620.962.399,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kerjasama Pemukiman		0,00	0,00
Uang Penjualan Permukiman Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Amanat Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kontribusi dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kontribusi dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemukiman		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bagian Dasar Sengketa/Bagian Sengketa Dasar (BGS/BSD)		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

12.0000.000000

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Kelengkapan Daerah s.d. Uraian/jumlah/akumulasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Ketersediaan Daerah Pihak Ketiga - Ketersediaan Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Konstruksi Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konstruksi Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lintas-Lintas		(38.543.780.944,00)	(48.799.040.527,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Renc. Kewil. s.d.		(27.731.678.452,00)	(35.632.795.741,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasilitas Umum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Komersial Perumahan MUDA Kerdusita Lantai Berjangan/Kondisi Daur Ulangan (KLEBUDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Sistem Distribusi Kawatirya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dauru Pemas Pembangunan Mergis Perumahan Suku Aset		(13.192.102.477,00)	(16.166.266.785,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Perumahan		0,00	0,00
Dana Transfer Lembaga Depdik Facility (LDF)		0,00	0,00
JMLAH ASSET LAINNYA		1.450.356.826,00	1.507.230.045,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jembatan, dan Jangkar		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Komposisi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
Jumlah Properti Investasi		0,00	0,00
Jumlah Asset		1.038.174.696.655,00	872.577.978.934,00
KERWAJIBAN			
KERWAJIBAN JANGKA MENDEK			
Utang Perimbangan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
Utang Tetap		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Kewajiban		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Kewajiban Kerja		0,00	0,00
Utang Jangka Jangka Kewajiban		0,00	0,00
Utang PPh Pasak		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 24		0,00	0,00
Utang PPh 24 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00

PUSKAS: 2025

22-08-2026

Halaman: 4



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

DESKRIPSI	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang PPh 24 Data BLUD		0,00	0,00
Uang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Uang PPh Pasal 4 ayat (2) & SPPD dan PPKD		0,00	0,00
Uang PPh Pasal 4 ayat (2) Data BLUD		0,00	0,00
Uang PPh 13		0,00	0,00
Uang PPh 13 di SPPD dan PPKD		0,00	0,00
Uang PPh 13 Data BLUD		0,00	0,00
Uang PPN Pasal		0,00	0,00
Uang PPN Pasal		0,00	0,00
Uang PPN di SPPD dan PPKD		0,00	0,00
Uang PPN Data RI UN		0,00	0,00
Uang Taperan		0,00	0,00
Uang Jarak Waktu Pegawai		0,00	0,00
Uang Pertimbangan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Uang Jarak		0,00	0,00
Uang Bangun		0,00	0,00
Uang Tanggung Jawab Pembiayaan Pensi		0,00	0,00
Uang Bangun Tanggung Jawab Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00
Uang Bangun Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Uang Bangun Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Uang Bangun Tanggung Jawab Masyarakat		0,00	0,00
Uang Bangun BLUD		0,00	0,00
Uang Bangun Asas Keterlibatan Pembiayaan Keterlibatan Pembiayaan Pajak		0,00	0,00
Uang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Uang Pinjaman dan Pembiayaan (Jangka Pendek)		0,00	0,00
Uang Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Uang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Uang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang dari Pembiayaan Pensi		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Uang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Pembiayaan		0,00	0,00
Sewa dan Keterlibatan Pembiayaan dan Pihak III		0,00	0,00
Uang Mula Penjualan Produk Proyek dan Pihak III		0,00	0,00
Uang Mula Lelang, Pengadaan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Denda Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Denda Rupa Rupa Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Denda Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Jipustipon		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Denda Lainnya PAD		0,00	0,00



Cheng, B. (2000).



AUDITED

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Melaya BLUD			0,00	0,00
Utang Belanja Pagawis REJIT			0,00	0,00
Utang Belanja Barisan Juru BLUD			0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD			0,00	0,00
Utang Hib. Istimewa Lembaga Media Nasional Kempres DKI Jakarta			0,00	0,00
Utang Belanja Instansi Sosial			0,00	0,00
Utang Melaya Modal Ases Tidak Berwujud			0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD			0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00
Utang Kelembagaan Pembiayaan PAJ			0,00	0,00
Utang Kelembagaan Pembiayaan Transfer			0,00	0,00
Utang Kelembagaan Pembiayaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sat			0,00	0,00
Utang Transfer			0,00	0,00
Utang Melaya Subjek			0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00
Kewajiban - Pembiayaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kelayakan			0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak			0,00	0,00
Utang Kompetitor Pajak			0,00	0,00
Kewajiban - Pembiayaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kelayakan			0,00	0,00
Utang Lainnya			0,00	0,00
Utang Jaminan Wajib Daerah			0,00	0,00
Utang Lainnya BLUD			0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			17.986.596.315,00	24.465.462.384,00
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang kepada Pemerintah Pusat			0,00	0,00
Utang atau Pembiayaan Pemerintah Dalam Negeri			0,00	0,00
Utang atau Pembiayaan Pemerintah Dalam Negeri ... Jangka Panjang			0,00	0,00
IPRD SLA 1247 (Proyek JEMAHNED)			0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)			0,00	0,00
Utang PER			0,00	0,00
Utang atau Pembiayaan Pemerintah Luar Negeri			0,00	0,00
Utang atau Pembiayaan Pemerintah Luar Negeri ... Jangka Panjang			0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JEMAHNED)			0,00	0,00
JICA SLA... (Proyek MRT)			0,00	0,00
Sumber Lainnya sebagai Pembiayaan Pemerintah Perdagangan-Usaha			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat			0,00	0,00
Kewajiban Kewajiban Jasa			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD			0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

(Lampiran Laporan)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		17.906.596.315,00	34.465.462.584,00
AKTIVA			
Ekuitas			
Ekuitas		43.117.018.983,00	209.791.371.485,00
Rekening lain-lain		937.151.081.397,00	628.374.348.867,00
BK PRKD-Kas		848.306.635.416,00	840.120.006.047,00
BK PRKD-Nol Kas		21.144.845.941,00	(210.745.360.980,00)
JUMLAH EKUITAS		1.000.368.100.340,00	849.212.516.959,00
JUMLAH AKTIVA		1.000.368.100.340,00	849.212.516.959,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.018.274.896.655,00	873.677.979.543,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2024
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Syony Tjahjadi
NIP 197204021993021001



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025**
Audited

**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2025**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Selda Provinsi DKI Jakarta Menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Selda Provinsi DKI Jakarta harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dan suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah



ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrua! sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penanmaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan operasional, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3706 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akruai;
25. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam 8 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dan langkah pemecahan menghadapi hambatan dan kendala.
- BAB III** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV** : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.



- BAB V** : Berisi tentang penjelasan atas informasi – informasi nonkeuangan yang terdiri dari struktur organisasi, tugas pokok, tujuan dan sasaran strategis dan penghargaan.
- BAB VI** : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian target kinerja keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp913.354.540.880,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp848.806.635.416,00 atau 92,93%. Dengan demikian belanja daerah yang tidak terserap sebesar Rp64.557.905.464,00 atau 7,07%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya



surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2025 Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp848.808.835 416,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

2.1.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp870.887 926.194,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp870.887.926.194,00.

2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp848.112.516.550,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(870.887.926.194,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp946.449.358.904,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp76.594.151.080,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1 000.268.100.340,00.

2.1.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1 018.174.896.655,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp603.089.248,00 Aset Tetap sebesar Rp1.016.621.251.381,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.950.356.026,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17 906 596.315,00 dan Rp1.000.268.100.340,00.

2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun



dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni 1 tujuan dan 5 sasaran.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Selda Provinsi DKI Jakarta

FUNGSI UMUM DAN ADMINISTRASI								
SASARAN STRATEGIS								
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PCUPB, Deputy dan Asisten Deputy a. Lingkungan Kompleks Perkantoran Balai Kota dan Rumah Dinas	Indeks Kapuasan Tertimbang Pelayanan Kompleks Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	3,7	3,865	3,72	4	4	4
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100,00%			91%	96,42%
3. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan integral Nomor (12)						100%	100%
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (30) Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)						100%	100%
SASARAN KHUSUS								
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang ukur dan adaptif	Opri Laporan Keuangan						(3) WTP	(3) WTP
6. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	97,36%
7. Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk 5 Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta						100%	100%
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat Sakip Perangkat Daerah Tahun 2022						AA (B1)	93,79
10. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai Predikat Perangkat Daerah Tahun 2022						95	98,57
11. Peningkatan Penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi						100%	100%
12. Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100%	100%
SASARAN OPERASIONAL								
13. Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen		100%	100%	100%	100%	100%
14. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen		100%	100%	100%	100%	100%
15. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Terwujud Hasil Pemerintahan Eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen		100%	100%	100%	100%	100%



2.2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Tabel 2.2
Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Layanan Rumpun dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Provinsi	913.384.540.880	248.806.635.410	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	667.758.978.048	397.345.437.600
				Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	1.487.110.583	1.430.484.750
				Administrasi Umum Pemerintah Daerah	12.757.304.602	11.153.864.736
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.624.404.756	13.834.015.084
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.371.133.300	81.214.393.724
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.161.819.708	31.096.487.117
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	61.587.012.681	80.642.087.362
Peningkatan Kualitas Layanan Rumpun dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Provinsi			Fasilitas Kemahasiswaan Sekretariat Daerah	14.468.247.542	13.212.735.500
				Fasilitas Keprotokolan	17.253.410.708	17.180.138.578



Tabel 2.3
Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Harmonisasi Kebijakan	Inventarisasi Kebijakan	Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/ diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang cepat
2	Sumber Daya Manusia	Tidak terdapat daya dukung dari Personil yang ada dalam mencapai tugas dan fungsi	Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan
		Kurangnya Kuantitas SDM yang menangani perkara dan harmonisasi	Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 berpedoman pada lampiran I Peraturan Pemerintah



Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terdapat dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan kelastan entitas pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah



Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya berisikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penentuan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut .

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.



4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Transfer,
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas

pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikacualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah;

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengasahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asus bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan dipertakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/bongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diterahkan kepada pihak ketiga.
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Akumulat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	600.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Kompiang	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Momen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jalinan, yg terdiri atas	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Aktif Peralatan Pendidikan	300.000
5.3	Barang Bekas	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	akumulasi komersial
5.5	Aset Tetap Rencanasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomtabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstrakomtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Setuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.700.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Perbaikan/Pemeliharaan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Radio dan TV	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Berwujud	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hasil	ekstra komstabel
5.5	Aset Tetap nonwujud	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Urutan	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dan Nilai Perolehan (Daur Peryusutan)	Pertambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Angkutan			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Perikanan/Peternakan			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kantor			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Rumah Tangga			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2

Urutan	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dan Nilai Perolehan (Dikur Pengumpulan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kodifikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat-alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jalan, Jembatan dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Rehabilitasi/ Overhaul dan Nilai Perbaikan (Dijuar Perbaikan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Infrastruktur	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakompiabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan

penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah ditentunya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. berupa kas dan setara kas.
2. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - c. Uang tunai di bendahara umum daerah.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan

pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

7. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 - b. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
 - c. Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagainya
8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari.

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi,
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku,
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/ rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan pendekatan beban sehingga pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) sebagai dasar pencatatan nilai akhir persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan.

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan,
- d. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai.

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

3.3.5.2 Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a. alat-alat besar
 - b. alat-alat angkutan
 - c. alat-alat bengkel dan alat ukur
 - d. alat-alat pertanian/peternakan
 - e. alat-alat kantor dan rumah tangga
 - f. alat studio dan alat komunikasi
 - g. alat-alat kedokteran
 - h. alat-alat laboratorium
 - i. alat keamanan
 - c. Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - a. bangunan gedung
 - b. bangunan monumen

- d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - o jalan dan jembatan
 - o bangunan air/irigasi
 - o instalasi
 - o jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - o buku dan perpustakaan
 - o barang-bercorak kesenian/kebudayaan
 - o hewan/ternak dan tumbuhan
 - o aset tetap-renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengenaan
3. Penilaian Aset Tetap
- Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2024 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 - c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat dialokasikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

- c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metoda garis lurus (*straight line method*) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut
- d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengenaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	10
2.3	Alat-alat Rengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	6
3	Gedung dan Bangunan yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Jembatan dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/manajemen	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan 1. Buku Perpustakaan 2. Barang Perpustakaan	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Berwujud Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Tamak dan Tumbuhan a. Hewan b. Tamak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman-Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa keajaib atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Diusutkan

- f. Terkait dengan penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) berdasarkan Bullel SAP Nomor 15, buku tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan.

3.3.5.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat, dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi.
2. Aset tidak berwujud merupakan aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
3. Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses di SK-Gubernur-kan, sehingga barang yang rusak tersebut masih merupakan barang titipan di gudang Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
4. Aset tetap yang belum divalidasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari hasil hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada Lembaga-lembaga bentukan Pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi proses kepemilikan/kepenguasaannya belum didukung oleh suatu keputusan perundang-undangan yang jelas. Sehingga perlu proses lebih lanjut supaya aset tetap yang dioperasionalkan oleh lembaga tersebut dapat terinventarisir dengan baik.

3.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

1. Suatu aset tetap dapat dihapus dan neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
3. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
4. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
5. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
6. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perkatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 hanya terdapat kewajiban jangka pendek.
5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
6. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pajak di SKPD, dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang telepon, air, listrik, dan internet (TALI), utang kepada pihak ketiga di SKPD, dan sebagainya.
7. Pengukuran kewajiban
 - a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - b. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - c. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - d. Utang Belanja Pegawai dicatat berdasarkan nilai gaji, tunjangan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan kinerja daerah yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
 - e. Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - f. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan.
 - g. Utang Lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan di luar utang pegawai, utang belanja TALI dan utang pihak ketiga.

3.3.7 Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Selda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "auditable" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (auditable).

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2016 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Selisih	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5:4
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	828.081.297.515	801.163.805.407		
2.1.1	Belanja Pegawai	699.042.929.030	672.449.033.548	26.593.895.484	3,9
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.038.388.486	128.719.771.861	-1.681.400.376	1,3
2.2	Belanja Modal	22.726.337.901	47.991.200.640		
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.748.740.088	38.550.832.288	-25.802.092.197	68,93



No.	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Selisih	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5:4
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	9.976.597.819	2.224.341.935	7.752.255.878	349,5
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	7.041.251.400	-7.041.251.400	-1
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	134.775.050	-134.775.050	-1
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	848.806.635,416	849.120.009,847	-313.370,631	389,0

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD/UKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga tidak mempunyai realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari satuan kerja, perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance Based Budgeting*) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp913,364,540,880.00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp848,806,635,416.00 atau 92,93% Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
		Anggaran	Realisasi	
			31 Desember 2025	
1	2	3	4	5 = 4:3
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	887,149,869,111	826,081,297,515	93,12
2.1.1	Belanja Pegawai	749,210,448,327	699,042,929,030	93,30
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137,939,220,784	127,038,368,485	92,10
2.2	Belanja Modal	28,214,871,768	22,725,337,901	86,89
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13,120,661,786	12,748,740,063	97,17
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	13,092,502,673	9,976,597,813	76,20
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan, dan Ingasi	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,707,310	0,00	0,00
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	913,364,540,880	848,806,635,416	92,93

Sumber: Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp749,210,448,327,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi senilai Rp699,042,929,030,00 atau 93,30% dari anggarannya. Dengan demikian



siswa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp,50,167.519,297.00 atau 8,69%.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp689,042,928.030,00 dan Rp672,449,033,546.00.

4.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diseenggarakan tiap unit kerja. Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp137,939,220,784.00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp127,038,368,485.00 atau 92,10% dari anggarannya. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp10,900,852,299.00 atau 7,90%

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp127,038,368,485.00 dan Rp128.719.771.861,00

Tabel 4.3
Pertandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2025	TA 2024		
Belanja Barang	23.141.462.921	19.575.661.437	3.465.801.484	17.61
Belanja Jasa	84.639.953.453	75.448.038.951	9.191.914.502	12.18
Belanja Pemeliharaan	19.256.952.111	33.596.071.473	-14.339.119.362	-42.68
Jumlah	127.038.368.485	128.719.771.861	-1.681.403.376	-1.30

4.1.2.3 Belanja Hibah

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda tidak memiliki anggaran belanja Hibah.

4.1.2.4 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)



bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.26,214,871,769 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp22.725,337,901,00 atau 86,69% dari anggarannya.

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	
2	3	4	5 = 4:3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,120,661,786	12,748,740,088	97,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,092,502,673	9,976,597,813	76,20
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,707,310	0,00	0,00
Jumlah	26,214,871,769	22,725,337,901	86,69

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22,725,337,901,00 dan Rp47,951,200,640,00.



Tabel 4.5
Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2025	TA 2024		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,746,740,088	39,550.632,255.00	25,802,092,167.00	-65,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,976,597,813	2,224.341,935.00	7,752,255,878.00	342,5
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	7,041,251,400	-7,041,251,400	-1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	134,775,050	-134,775,050	-1
Jumlah	22,723,337,901	47,951,200,640	-25,225,862,739.00	-52,60

4.2 Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu. Secara umum, ringkasan Neraca Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.6
Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih	%
Aset				
Aset Lancar	603,089,248	575,516,001	27.573.247	4,79
Aset Tetap	1,015,621,251,381	869,685,232,238	145,926,019,143	16,77
Aset Lainnya	1,950,356,026	2,307,230,695	-356.874.669	-15,46
Jumlah Aset	1,018,174,696,655	872,577,978,934	145,596,717,721	16,68
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	17,906,596,315	24,465,462,384	-8,558,866,069	-26,80
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	17,906,596,315	24,465,462,384	-8,558,866,069	-26,80
Ekuitas	63,117,018,993	209,737,871,493	-146,620,852,500	69,90
Ekuitas SAL				
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	937,151,081,357	838,374,845,067	298.776.436.290	46,60
Jumlah Ekuitas	1,000,268,100,340	848,112,516,550	152,155,583,790	17,84
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1,018,174,696,655	872,577,978,934	145,596,717,721	16,68

4.2.1 Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan



sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Saldo Aset Lancar pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp575,516,001,00. Sedangkan Saldo aset lancar pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp603,089,248,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	(Dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Sisa UP	-	-
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Belanja Dibayar Dimuka		
Belanja Barang Dibayar Dimuka	445.258.766	300.546.478
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	22.159.929	10.200.000
Persewaan		

Barang Pakai Habis	135.670.553	145.519.879
Jumlah Aset Lancar	603.089.248	575.516.001

4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian.

Saldo piutang per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp119.249.646,00. Sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

4.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 (Audited) adalah senilai Rp0,00. Sedangkan saldo penyisihan piutang tak tertagih Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00.

4.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka

Pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp310.746.476,00. Saldo tersebut merupakan :



1. Deposih BBM yang sampai dengan 31 Desember 2024 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp300.546.476,00.
2. Saldo Lisensi Zoom Meeting per 31 Desember 2024 senilai Rp10.200.000,00.

Sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp467.418.695,00, terdiri dari :

1. Deposih BBM yang sampai dengan 31 Desember 2025 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp445.258.766,00
2. Saldo Lisensi Zoom Meeting per 31 Desember 2026 senilai Rp22.158.929,00.

4.2.1.1.5 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya

Pada Neraca per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp145.519.879,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai Habis yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024. Sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp135.670.553,00

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk

Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp889.695.232.238,00, sedangkan saldo aset Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp1.015.621.251.381,00.

Tabel 4.8
Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Tanah	468.512.780.000	468.512.780.000
2.	Peralatan dan Mesin	122.269.833.350	108.767.820.324
3.	Gedung dan Bangunan	1.205.416.243.437	1.095.836.460.287
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.318.835.697	12.318.835.697
5.	Aset Tetap Lainnya	260.371.290	260.371.290
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-71.892.623.045	-55.142.966.688
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-713.314.402.084	-753.467.069.487
9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-7.770.281.004	-7.238.447.935
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-179.506.260	-152.551.250
Jumlah		<u>1.015.621.251.381</u>	<u>889.695.232.238</u>

Sumber : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta



4.2.1.2.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah Senilai Rp468.512.780.000,00 dan Rp468.512.780.000,00. Mutasi pada Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	468.512.780.000
Saldo Per 31 Desember 2025	468.512.780.000

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp108.767.820.324,00 dan Rp122.269.833.350,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	108.767.820.324
----------------------------	-----------------

Penambahan :

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	12.748.740,088
Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.155.508,134
Reklasifikasi Aset MPSA menjadi Aset Tetap	199.500,000.
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	259.584.260

Pengurangan :

Transfer Keluar ke SKPD Lain	1.305.390.000
Reklas antar Aset Tetap	258.482.850
Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	112.001.177
Reklas Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	5.098.788



Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Barang Pakai Habis	71,138,333
Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2025)	109,206,308
Saldo per 31 Desember 2025	122.269.833.350

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.095.836.460.287,00 dan Rp1.205.416.243.437,00. Mutasi pada Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	1.095.836.460.287
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	9,976,597,813
Transfer Masuk dari SKPD Lain	96,202,420,854
Reklas Antar Aset Tetap	258,482,850
Kapitalisasi dan Beban Pemeliharaan	3,518,243,323
Pengurangan	
Reklas Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Pemeliharaan	299,965,298
Reklas Belanja Modal Tahun 2025 ke rekening penampungan	75,996,392
Saldo per 31 Desember 2025	1.205.416.243.437

4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.318.835.697.00 dan Rp12.318.835.697.00. Tidak ada



penambahan atau pengurangan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp260.371.290.00 dan Rp260.371.290.00. Tidak ada penambahan atau pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(55.142.966.688) dan Rp71.892.623.045). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	(55.142.966.688)
Penambahan	
Beban Penyusutan Tahun 2025	(15,236,364,532)
Transfer Masuk dari SKPD Lain	(937,409,914)
Koreksi Kurang Catat	(1,236,460,251)
Reklas dari Aset dalam Proses MPSA menjadi Aset Tetap	(124,687,500)
Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	495,465,000
Reklas Antar Aset Tetap	103,393,140
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	112,001,177

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Ekstrakomtabel (selain Belanja Modal Tahun 2025)	73,406,523
Saldo per 31 Desember 2024	(71.892.523.045)

2025

4.2.1.2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(753.467.089.487,00) dan Rp(713.314.402.084,00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	(753.467.089.487)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2025	(32,342,510,481)
Transfer Masuk dari SKPD Lain	(4,522,669,688)
Reklas Antar Aset Tetap	(103,393,140)
Pengurangan	
Koreksi Lebih Catal	77,121,240,692
Saldo per 31 Desember 2024	(713,314,402,084)

4.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(7.238.447.935.00), sedangkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.770.281.004,00. Mutasi pada Akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2024	(7.238.447.935)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2025	(531.833,068)
Koreksi Kurang Catat	(1.00)
Saldo per 31 Desember 2026	(7.770.281.004)

4.2.1.2.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Selda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(152.551.250.00), sedangkan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp(179.506.260). Sebagai Berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	(152.551.250)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2025	26,955,010
Saldo per 31 Desember 2024	(179.506.260)

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo nilai Aset Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 (Audited) yakni senilai Rp2.307.230.895.00, sedangkan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.950.356.026,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.9
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Aset Tidak Berwujud	0	0
2.	Akumulasi Aset Tidak Berwujud	0	0
3.	Aset Tetap Rusak Berat	23.523.323.000	26.085.308.823

4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(23.351.678.452)	(25.632.793.741)
5.	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	16.970.813.955	18.020.982.399
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(15.192.102.477)	(16.166.288.786)
7.	Aset Tetap Belum Divalidasi	0	0
8.	Akumulasi Aset Tetap Belum Divalidasi	0	0
	Jumlah (Setelah Akumulasi Penyusutan Aset)	1.950.358.026	2.307.230.695

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Sekeloa Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik namun memberikan manfaat ke unit kerja. Nilai saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp0,00 sedangkan nilai saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 yakni senilai Rp0,00.

Saldo per 31 Desember 2024	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp0,00, sedangkan nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Saldo per 31 Desember 2024	0
Saldo per 31 Desember 2025	0



4.2.1.3.2 Aset Rusak Berat

Aset ini merupakan barang-barang kondisi rusak berat yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp26.085.308.823,00, Sedangkan nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.523.323.000,00

Saldo per 31 Desember 2024	26.085.308.823
----------------------------	----------------

Penambahan

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	112,001,177
---	-------------

Pengurangan

Penghapusan	2,673,987,000
-------------	---------------

Saldo per 31 Desember 2024	23.523.323.000
----------------------------	----------------

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp(25.632.793.741,00) , sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp(23.361.687.452)

Saldo per 31 Desember 2024	(25.632.793.741)
----------------------------	------------------

Penambahan

Beban Penyusutan 2025	94,770,344
-----------------------	------------

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	112,001,177
---	-------------

Koreksi Kurang Catat	82.470.800
----------------------	------------

Pengurangan

Penghapusan	1.771.013.660
-------------	---------------

Koreksi Lebih Catat	779,343.950
---------------------	-------------

Saldo per 31 Desember 2025	(23.361.687.452)
----------------------------	------------------

4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

Nilai saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2024 (Audited) senilai



Rp18.020.982.399,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp16.970.813.955,00

Saldo per 31 Desember 2024	18.020.982.399
Pengurangan	
Penghapusan	850,668,444
Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	199,500,000
Saldo per 31 Desember 2025	16.970.813.955

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp(18.166.266.788,00) untuk saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp(15.192.102.477,00).

Saldo per 31 Desember 2024	(18.166.266.788)
Pengurangan	
Penghapusan	849,476,809
Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	124,687,500
Saldo per 31 Desember 2025	(15.192.102.477)

4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi

Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai saldo Aset Tetap Belum Divalidasi per 31 Desember 2024 (Audited) maupun per 31 Desember 2025 yakni senilai Rp0,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Belum Divalidasi per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp0,00).

4.2.2 Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.906.586.315,00 dan Rp24.465.462.384,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.9
Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	17.906.596.315	24.465.462.384
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah	17.906.596.315	24.465.462.384

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang PFK di SKPD, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja TALI, Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.10
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang PFK di SKPD	0	0
2.	Utang Belanja Pegawai	13.008.900.993	13.103.716.299
3.	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.238.251.669	11.361.746.085
4.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RPBATA)	1.659.443.453	0
5.	Utang lainnya	0	0
	Jumlah	<u>17.906.596.315</u>	<u>24.465.462.384</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Selda Provinsi DKI Jakarta



4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD

Kewajiban ini terdiri dari pajak yang dipungut masing-masing UKPD namun sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyetoran. Saldo per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp0.00 sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp0.00.

4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai

Kewajiban ini merupakan utang gaji dan TKD PNS Biro-Biro dilingkungan koordinasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov DKI Jakarta. Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp13.103.716.299,00. Angka tersebut seluruhnya telah dibayarkan pada Bulan Januari 2024, sehingga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.008.900.993

Tabel 4.11
Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)			
No	SP2D	Rincian	Jumlah
1	1 000397/SP2D/H/2025	PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PLT BULAN DESEMBER 2024 (5 UKPD, 4 JIWA) BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO 19 / 2020 TA. 2025	Rp126 000.000 23 januari 2025
2	1 000273/SP2D/H/2025	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (PNS) BULAN	Rp12.313.917.018 22 januari 2025

		DESEMBER 2024 (13 UKPD, 547 JIWA) BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO. 19 TAHUN 2020 TA. 2025	
3	1 000062/SP2DM/2025	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BEBAN KERJA (145 JIWA, 10 UKPD) BULAN DESEMBER 2024 BERDASARKAN PASAL 48 PERATURAN GUBERNUR NO 49 TAHUN 2022 TA. 2025	Rp603.540.141 15 Januari 2025
4	1 000272/SP2DM/2025	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (PPPK) BULAN DESEMBER 2024 (8 UKPD, 13 JIWA) BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO. 33 TAHUN 2022 TA. 2025	Rp60.259.140 22 Januari 2025
Jumlah			Rp13.103.718.290

Tabel 4.12
Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025

No	SP2D	Rincian	Jumlah
1	1000367/SP2D/I/2026	PEMBAYARAN RAPEL KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (PPPK DAERAH) BULAN OKTOBER 2025 (1 UKPD, 1 JIWA) TA. 2026 BERDASARKAN PERGUB NO 18 THN 2025	Rp4,050,000 (Di bayar tgl 21 januari 2026)
2	1000368/SP2D/I/2026	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (PPPK) BULAN DESEMBER 2025 (7 UKPD, 27 JIWA) BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO. 18 TAHUN 2025 TA 2026	Rp 388.458,150 (Di bayar tgl 21 Januari 2026)
3	1000370/SP2D/I/2026	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (PNS) BULAN DESEMBER 2025 (13 UKPD, 588 JIWA) BERDASARKAN	Rp.12,054,898,737 (Di bayar tgl 21 Januari 2026)



		PERATURAN GUBERNUR NO. 19 TAHUN 2020 TA 2020	
4	1000161/SP2D/I/2026	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BEBAN KERJA (139 JIWA, 10 UKPD) BULAN DESEMBER 2025 BERDASARKAN PASAL 4B PERATURAN GUBERNUR NO. 69 TAHUN 2022, 1A 2026	Rp. 582,658,402 (Dibayar tgl 15 Januari 2026)
5	1000162/SP2D/I/2026	PEMBAYARAN RAPEL KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (PNS DAERAH) BULAN OKTOBER 2025 (1 UKPD, 1 JIWA) TA. 2026 BERDASARKAN PERGUB NO 19 TAHUN 2020.	Rp. 835,704 (Di bayar tgl 15 Januari 2026)
Jumlah			Rp.13.008.900.993

4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa

Kewajiban ini terdiri dari utang belanja barang dan utang belanja jasa. Utang belanja jasa terdiri dari Utang Belanja Pemeliharaan



dan Utang Belanja Perjalanan Dinas, Utang Jasa (telepon, air, listrik, dan internet) yang dipergunakan selama tahun berjalan namun tagihannya belum dibayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan.

Utang Belanja TALI Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp11.361.746.085,00.

Tabel 4.13
Utang Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Utang TALI	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang TALI	2.179.888.516	1.945.101.912
2.	Utang Belanja Pemeliharaan RP BATA Utang Barang dan Jasa	1.058.363.353	9.409.024.883
	Jumlah	<u>3.238.251.869</u>	<u>11.351.746.085</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Saldo Utang Belanja dan Jasa Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp11.361.746.085,00, yang terdiri dari :

1. Utang Belanja Telepon sebesar Rp35.942.302,00;
2. Utang Belanja Listrik senilai Rp1.916.779.100,00,
3. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.409.024.883, utang belanja tersebut merupakan pekerjaan RPBATA, yang cutoff pekerjaan tanggal 21 Desember 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Untuk saldo utang Belanja TALI Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp1.952.721.402,00. Nilai tersebut seluruhnya telah dibayarkan pada Tanggal 17 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14
Rekapitulasi Utang TAL
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	SP2D	Rincian	Jumlah
1	1 000102/SP2D/2025	Pembayaran tagihan jasa telekomunikasi bulan januari 2025 a.n. sekretariat daerah pemprov DKI Jakarta	Rp35.942.302 17 januari 2025
2	1 000101/SP2D/2025	pembayaran tagihan rekening listrik rumah dinas (sewa) sekretaris daerah bulan januari 2025 ses no kuitansi 3.051.3 / 02012025 a.n. Biro Umum & Adm Setdaprov DKI Jakarta	Rp5.051.100 17 januari 2025
3	1 000100/SP2D/2025	pembayaran tagihan rekening listrik rumah dinas pimpinan bulan januari 2025 ses no kuitansi 3.091.1 / 02012025 a.n. Biro Umum & Adm Setdaprov DKI Jakarta	Rp18.020.741 17 januari 2025
4	1 000086/SP2D/2025	pembayaran tagihan rekening	Rp1.893.707.256 17 januari 2025



	Ilstrik komplek balakota bin januari 2025 ses no kuitansi 3.091.2 / 02012025 a.n. BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SETDAPROV DKI JAKARTA	
Jumlah		Rp1.952.721.402

Saldo Utang Belanja dan Jasa Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp17.906.596.315,00, yang terdiri dari :

1. Utang Pegawai sebesar p.13.008.900.883,00
2. Utang Belanja dan Jasa sebesar Rp3.238.251.868,00, terdiri dari :
Utang Tali sebesar Rp. 2.179.888.516.00
Utang RP Bata Rp. 1.058.363.353
3. Utang Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.658.443.453, ini merupakan RPBATA, jadi total RPBATA sebesar Rp. 2.717.806.806, dengan rincian sbb :

Tabel 4.15
Rincian RPBATA
Tahun 2025

No	Rincian	Jumlah
1	RPBATA PEMASANGAN PINTU KACA LT DASAR BLOK H DAN LT 3 GRAHA ALI SADIKIN - PT PEJATEN JAYA ABADI	94.186.171



2	RPBATA PEKERJAAN PENATAAN RUANG KERJA LT 6 TERMIN II - PT SRI SUMITRA SAH	1.301.043.045
3	RPBATA PEK PENGAWASAN PENATAAN R SELASAR BLOK B LT DSR TERMIN II PT KOMSHA AKUR CONSULT	47.751.090
4	RPBATA PEK PERBAIKAN PLAFON & LT SELASAR BLOK B TERMIN II CV ABEL ANUGRAH JAYA	588.162.488
5	RPBATA PEK PERBAIKAN KEBOCORAN GD BLOK H PT MARISI PRATAMA JAYA	307.932.376
6	RPBATA PRBK TOILET DI GRHA ALI SADIKIN PT SUAN TAFUI KARYA	240.100.235
7	RPBATA PEK PENGAWASAN PENATAAN LT 6 TERMIN II PT HERPIS PERTOMA MULIA	56.513.400
8	RPBATA PEK PENY PERKAP PMLHRAAN & PNGWSN BNGNN GDNG - PT GLOBAL TRITUNGGA MANDIRI	48.052.000
	Jumlah	Rp2.717.808.888

Tabel 4.16
Rekapitulasi Utang TALI
Per 31 Desember 2024

No	SP2D	Rincian	Jumlah
1	1000349/SP2D/2026	PEMBAYARAN TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI BULAN JANUARI 2026 A.N. SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA (Belanja Tagihan Telepon)	22.857,005 (Di bayar tgl 21 Januari 2026)
2	1000605/SP2D/2026	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK (SPKL)	5.436,918

		BALAIKOTA BULAN JANUARI 2026 SES NO KUITANSI 3.103.1 / 02012026 (Belanja Tagihan Listrik)	(Di bayar tgl 28 Januari 2026)
3	No. PGWELC/2026/01/001	Dibayarkan Tagihan Listrik Townhomes Unit G17 Periode 26 November 2025 TO 25 Desember 2025 berdasarkan Invoice No. PGWELC/2026/01/001 (Belanja Tagihan Listrik)	6,130,338 (Di bayar tgl 2 Februari 2026)
4	No. PGWWTR/2026/01/001	Dibayarkan Tagihan air Townhomes Unit G17 Periode 26 November 2025 TO 25 Desember 2025 berdasarkan Invoice No. PGWWTR/2026/01/001 (o Meter D2OS-000774). Belanja Tagihan Air)	355,588 (Di bayar tgl 2 Februari 2026)
5	PGWWTR/2026/01/002	Dibayarkan Tagihan air Townhomes Unit G17 Periode 26 November 2025 TO 25 Desember 2025 berdasarkan Invoice No. PGWWTR/2026/01/002. (Belanja Tagihan Air)	174,101 (Di Bayar tgl 2 Februari 2026)
6	1 000063/SP2D/1/2026	PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK KOMPLEK BALAIKOTA BULAN JANUARI 2026 SES NO KUITANSI 3.091.2 / 02012026. (Belanja Tagihan Listrik)	1.806,248,348 (Di bayar tgl 14 Januari 2026)
7	1 000064/SP2D/1/2026	PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK RUMAH DINAS PIMPINAN BULAN JANUARI 2026 SES NO KUITANSI 3.091.1 / 02012026	47.443,988 (Di bayar tgl 14 Januari 2026)
8	1 000129/SP2D/1/2026	PMBYRN TAGIHAN AIR KOMPLEK BALAIKOTA BLN DESEMBER 2025 SES NOREK	275.515,065



		000352062,000352063,000352064 A.N. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. (Belanja Tagihan Air)	(Di bayar tgl 15 Januari 2026)
9	1 000130/SP2DN/2026	PMBYRN TAGIHAN AIR RUMAH DINAS BULAN DESEMBER 2025 SES NOREK 000350016.000350017,000350018.0003605.00003623 A.N. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. (Belanja Tagihan Air)	13,728.167 (Di Bayar tgl 15 Januari 2026)
	Jumlah		Rp2.178.888.518

4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas. Ekuitas SAL. dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp848.112.516.550,00 terdiri dari Ekuitas Rp209.737.871.483,00 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp638.374.645.067,00. Sedangkan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 senilai Rp1.000.268.100.340,00 terdiri dari Ekuitas Rp63.117.018.983,00 dan Ekuitas untuk di Konsolidasikan Rp937.151.081.357,00.

4.3 Laporan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp(821.914.750.518,00) dan Rp(870.887.926.194,00). Jumlah Tahun 2025 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp(870.887.926.194,00)



4.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga Pendapatan Operasional sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00.

4.3.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam Laporan Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Laporan Operasional Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp821.914.750.518,00 dan Rp870.887.926.194,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Tabel 4.17
Perbandingan Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 (Data Rupan)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	698.948.113.724	652.531.260.374	46.416.853.350	5,12
Beban Barang	23.126.351.363	21.817.120.468	1.309.230.894	6,00
Beban Jasa	84.855.160.638	75.434.542.701	9.420.617.937	12,48
Beban Pemeliharaan	15.725.867.054	18.364.076.848	2.760.960.817	16,88
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.232.433.415	66.777.760.125	-22.572.793.238	-40,46
Jumlah	870.887.926.194	821.914.750.518	37.334.889.806	4,54

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp652.531.260.374,00 dan Rp698.948.113.724,00

Tabel 4.18
Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Pegawai	698.948.113.724	699.042.929.030	-94.815.306
Jumlah	<u>698.948.113.724</u>	<u>699.042.929.030</u>	<u>-94.815.306</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yg berasal dari pembayaran beban pegawai Tahun 2025 senilai Rp699.042.929.030,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 dan pengakuan beban barang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Beban Pegawai Tahun 2025-LRA	Rp	699.042.929.030
Di kurangi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	Rp	-94.815.306
Jumlah	Rp	<u>(698.948.113.724)</u>

4.3.2.2 Beban Barang

Beban barang merupakan pembelian barang-barang non persediaan baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang.

Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp23.126.351.363,00 dan Rp21.817.120.468,00.

Tabel 4.19
Pertbandingan Beban Barang LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Barang	23.126.351.363	23.141.462.921	-15.111.558
Jumlah	<u>23.126.351.363</u>	<u>23.141.462.921</u>	<u>-15.111.558</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yg berasal dari pembayaran beban barang Tahun 2026 sebesar Rp23.141.462.921,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 dan pengakuan beban barang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember 2024	Rp	146.519,879
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2024	Rp	300.546,476
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	Rp	71.138,333
Reklas Aset Tetap/Lain2 ke Ekstrakomtabel	Rp	40.898.573
Transfer masuk Persediaan dari SKPD Lain	Rp	7.714,500
Dikurangi .		
Belanja Barang di Bayar di muka per 31 Desember 2025	Rp	445.258,766
Persediaan Per 31 Desember 2025	Rp	136.670.553
Jumlah	Rp	<u>-15.111.558</u>

4.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa timbul karena jasa yang telah diterima Biro-Biro baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang seperti beban TALI dan beban jasa lainnya. Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp94.855.160.638 00 dan Rp75.434.542.701,00.

Tabel 4.20
Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Jasa	84.855.160.638	84.639.953.453	215.207.185
Jumlah	84.855.160.638	84.639.953.453	215.207.185

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yg berasal dari pembayaran beban jasa Tahun 2025 senilai Rp84.855.160.638,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 dan pengakuan beban jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember

204 Rp 10.200.000

Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 Rp 2.179.888.516

Di kurangi :

Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024 Rp 1.952.721.402

Belanja Jasa di Bayar di muka Per 31 Desember 2025 Rp 22.159.929

Jumlah **Rp 215.207.185**

4.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.725.867.054 dan Rp16.354.076.849,00.

Tabel 4.21
Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan	15.725.867.054	19.256.952.111	-3.531.085.057
Jumlah	15.725.867.054	19.256.952.111	-3.531.085.057

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yg berasal dari pembayaran beban pemeliharaan Tahun 2025 senilai Rp19.115.037.766,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 dan pengakuan beban jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban

Pemeliharaan	Rp	299.985.298
--------------	----	-------------

Di kurangi :

Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	Rp	3.777.827.583
---	----	---------------

Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas	Rp	53.222.772
---------------------------------------	----	------------

Diterima di Tahun Berikutnya

Jumlah	<u>Rp</u>	<u>-3.531.085.057</u>
--------	-----------	-----------------------

4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

4.3.2.6 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi. Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp48.232.433.415,00 dan Rp55.777.750.125,00.

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.000.268.100.340,00 dan Rp848.112.516.550,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.22
Perbandingan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	848.112.516.560	938.425.282.367
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	(870.887.926.194)	(821.914.750.518)
Mutasi RK PPKD	946.449.358.804	638.352.521.467
Koreksi Ekuitas	76.594.161.080	93.249.463.234
Jumlah Perubahan Ekuitas	152.155.583.790	(90.312.766.817,00)
Ekuitas Akhir		
Ekuitas – LO	63.117.018.983	209.737.871.463
RK PPKD	937.151.081.367	638.374.645.067
EKUITAS AKHIR	1.000.268.100.340	848.112.516.560

Sumber: Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah Rp848.112.516.560,00 dan Rp938.425.282.367,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

4.4.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(870.887.926.194) dan Rp(821.914.750.518). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp946.449.358.804,00 dan Rp638.352.521.467,00



4.4.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp76.694.151.080,00 dan Rp93.249.463.234,00. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.

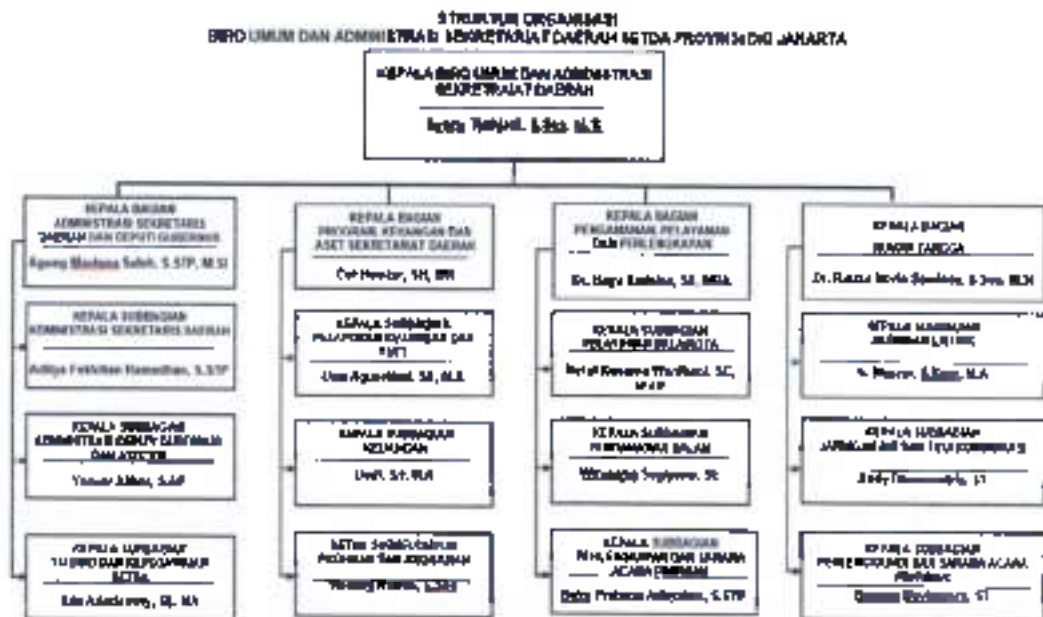
4.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.000.268.100.340,00 dan Rp848.112.516.550,00. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Gambar 5.1



5.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditanya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saluran Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur :



- Kedudukan :**
1. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah,
 2. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan
- Tugas :** Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam kompleks gedung balai kota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balai kota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan Sekretariat Daerah.
- Fungsi :**
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan rumah tangga kompleks gedung balai kota dan rumah dinas pimpinan;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung balai kota dan rumah dinas pimpinan;
 - e. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penggunaan kompleks gedung balai kota;
 - f. pengoordinasian, penyiapan, pemantauan dan evaluasi perlengkapan dan sarana acara;
 - g. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur;
 - h. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi ketatausahaan ketatausahaan Sekretariat Daerah;
 - i. pelaksanaan kesekretariatan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
 - j. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;

- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang dibenarkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

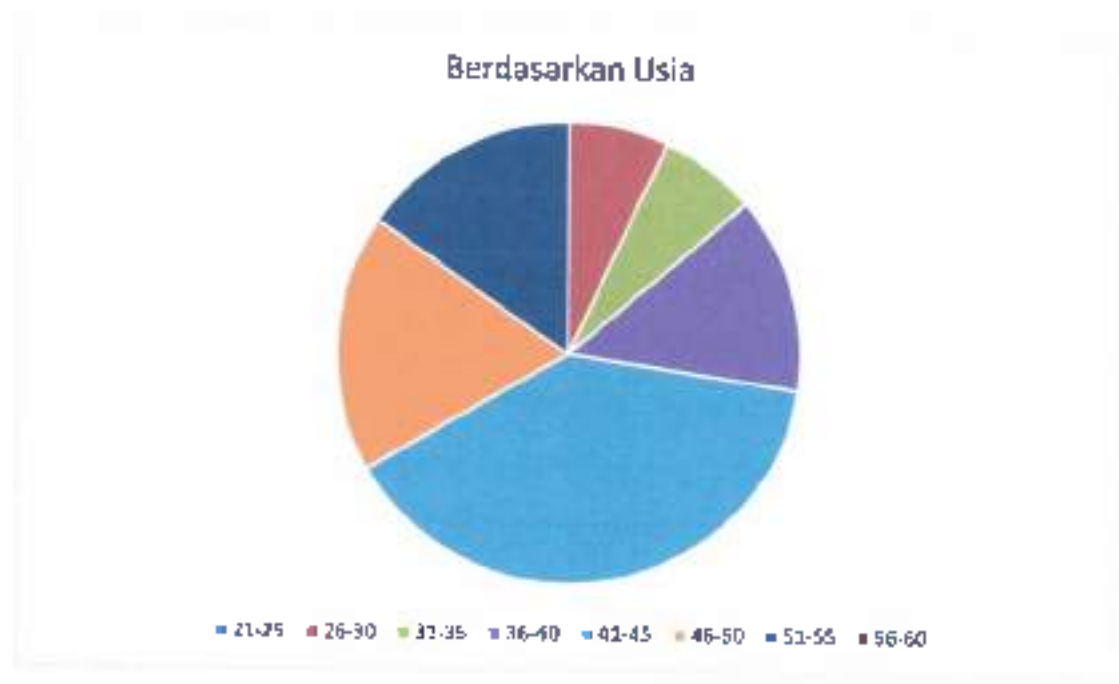
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- A. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Bangunan Gedung;
 - 2) Subbagian Jaringan Listrik, dan
 - 3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;
- B. Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pengamanan Dalam;
 - 2) Subbagian Pelayanan Balakota; dan
 - 3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;
- C. Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;
 - 2) Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- D. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset;
- E. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Dalam menunjang Kinerja Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 117 pegawai per 31 Desember 2025 yang terbagi kedalam 4 Bagian dan 11 Subbagian dan 1 Sub Kelompok dimana rentang berdasarkan usia antara lain :



Gambar 5.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Usia 26 – 30	: 8 orang
Usia 30 – 35	: 8 orang
Usia 36 – 40	: 16 orang
Usia 41 – 45	: 46 orang
Usia 46 – 50	: 21 orang
Usia 51 – 55	: 18 orang
Usia 56 – 60	: 0 orang
Usia Jumlah	: 117 orang

Gambar 5.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



SMA : 34 orang
 D3 : 6 orang
 D4 / S1 : 65 orang
 S2 : 10 orang
 S3 : 2 orang
 Jumlah : 117 orang

5.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

FUNGSI UMUM DAN ADMINISTRASI						
SASARAN STRATEGIS						
1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Implementasi PDUPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balakota dan Rumah Dinas	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balakota dan Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	3,7	3,006	3,77	4
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100-00%		91%
3. Terjalarnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100%	100%



Tujuan	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022	
			Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan
	peningkatan keterbacaan yang berkualitas bagi semua	yang terakumulasi dan terintegrasi Nomor 12)						
	4. Tercapainya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Rencana Kerja Menegapdikan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Preskriptor AA Nomor (30) Persentase penyelesaian rencana kerja Penegakan Kualitas Kerja Pemerintahan Nomor (14)				100%	100%	
SASARAN KHUSUS								
	5. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertata dan tertib	Open Laporan Keuangan				(3) WTP	(3) WTP	
	8. Meringkainya Persentase E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemakaian E-Order				100%	87,30%	
	7. Tercapainya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk 6 Program/Program Urusan dan Unggulan Peringkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program urusan dan unggulan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta				100%	100%	
	9. Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Produk SAKIP Peringkat Daerah Tahun 2022				AA (B)	83,73	
	10. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan	Nilai PMPRR Peringkat Daerah Tahun 2022				98	98,67	

5.4 Penghargaan

Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Seldaprov DKI Jakarta	22/11/2022	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan sebagai Badan Publik terbaik 1 kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Seldaprov DKI Jakarta	02/06/2023	Penghargaan sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Surat Hibauan Pemadanan NIK dan NPWP	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Penghargaan sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Surat Hibauan Pemadanan NIK dan NPWP



Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov DKI Jakarta	17/08/2023	Penghargaan atas perannya pada acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden	Penghargaan atas perannya pada acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta
Biro Umum dan Administrasi Setda	21/12/2023	Badan Publik Terbaik Informatif Kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023"	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengukur kapabilitas Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 Audited, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 Audited, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp913.364.540.890,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp848.806.635.416,00 atau 92,93%. Dengan demikian belanja daerah yang tidak terserap sebesar Rp64.557.905.464,00 atau 7,07%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2025 Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi



DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp848.806.635.416,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

6.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dan Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp870.887.926.184,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp870.887.926.184,00.

6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp848.112.516.660,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(870.887.926.184,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp946.449.358.904,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp76.594.151.080,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.000.268.100.340,00

6.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.018.174.696.655,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp603.089.248,00, Aset Tetap sebesar Rp1.015.621.251.381,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.950.356.026,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.906.596.315,00 dan Rp1.000.268.100.340,00

Demikian Laporan Keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 Audited.

Jakarta, 2026
KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,



SYONY TJAHJADI
NIP 197204021993021001



